

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, I. (2018). *Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah Pada BPRS Harta Insan Karimah Ciledug Prespektif Analisis SWOT*.
- Arta, I. P. S. (2021). *Manajemen Risiko*. Widina Bhakti Persada.
- Bangsawan, R. (2015). *Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Inspektorat Kota Palembang*.
- Brilliant willis, Lanny Kusumawati, W. S. D. R. (2023). Keterkaitan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Prinsip Good Financial Governance. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 21.
- Dewi Kurniasih, Yudi Rusfiana, Agus Subagyo, R. N. (2021). *Teknik Analisa*. Alfabeta.
- Dhea Ayu Risna, & Aprilya Dwi Yandari. (2022). Peran Inspektorat Dalam Melakukan Coaching dan Controlling SPIP Untuk Mempertahankan Hasil Opini Audit (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sumenep). *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(6), 2801–2814.
<https://doi.org/10.55927/mudima.v2i6.516>
- Fanny Octapiani, Mia Rosmiati, L. I. (2021). Implementasi Manajemen Risiko Dalam Upaya Mewujudkan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintah Daerah The Implementation Of Risk Management In Order To Realize The Prinsiples Of Good Governance At Regional Government Of West Bandung Regency. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 378–385.
- Fazri, M. Al. (2022). *Strategi Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian*

(WTP) Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.

Jember, P. B. (2024). *Peraturan Bupati No 1 2024 Manajemen Risiko.*

Kristiana, R. (2022). *Manajemen Risiko.* CV. Mega Press Nusantara.

Nadhilla, C. S. (2022). *Strategi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh.*

Omposunggu, S. G., & Salomo, R. V. (2019). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 5(1), 78–86.

Puji Astuti Rahayu, Sylvia Fettry, M. P. (2020). Menelusuri Keberhasilan dan Kendala Pemda di Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Memperoleh Opini WTP dari BPK: Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi*, 12, 23–46. <http://journal.maranatha.edu>

Putra, L. A. G. (2021). *Strategi Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.*

Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian.* Antasari Press.

Ramdani, M., & Fauzi, M. A. (2023). Strategi Pemerintah Kota Bogor dalam Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas Laporan Keuangan. *JSHP*, 7(02), 2580–5398. <https://doi.org/10.32487/jshp.v7i1.1xxx>

- RI, B. (2017). *Peraturan BPK Nomor 1*.
- RI, P. P. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Sarjana, S. (2022). *Manajemen Risiko* (H. F. Ningrum (ed.)). CV. Media Sains Indonesia.
- Sedarmayanti. (2003). *Penerapan Good Governance Dalam Organisasi Pemerintahan*.
- Setiyanti, S. W. (2012). Jenis-Jenis Pendapat Auditor (Opini Auditor). *Jurnal STIE Semarang*, 4(2), 19–28.
- Sugianto, M. S. A. (2023). Strategi Laporan Keuangan Dalam Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Di Baznas Kabupaten Jember Tahun 2021. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 2(2), 125–133. <https://doi.org/10.32939/acm.v2i2.3069>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti. (2022). *Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Sebagai Kriteria Perumusan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Suwanda, D. (2019). *Good Governance (Pengelolaan Keuangan Daerah)*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang, R. N. 15. (2004). *Undang-Undang Presiden republik indonesia Nomor 15 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

Widodo Indrijantoro, I., & Irwansyah. (2023). Strategi Penerapan Manajemen Resiko dalam Rangka Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Bekasi. *Jurnal Ilimah Ilmu Administrasi*, 6(1), 86–94.